

## Keterkaitan Ekonomi Publik dengan Pendapatan Nasional dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat

Tita Deska Sari<sup>1\*</sup>, Hendra Riofita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155, KM 15, Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani (sebelumnya Tampan), Pekanbaru, Riau

E-mail: [titadeska529@gmail.com](mailto:titadeska529@gmail.com)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6739>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history:

Received: 08 Jun 2026

Revised: 14 Jun 2026

Accepted: 20 Jun 2026

#### Kata Kunci:

Ekonomi Publik,  
Pendapatan Nasional,  
Kesejahteraan  
Masyarakat, Kebijakan  
Fiskal.

#### Keywords:

Public Economics,  
National Income,  
Social Welfare, Fiscal  
Policy.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ekonomi publik berperan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi, sedangkan pendapatan nasional digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal dan sumber data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi publik memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan nasional agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional terbukti berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan publik. Namun, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan akibat adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi publik yang efektif untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara ekonomi publik dan pendapatan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara keduanya sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan.

*This study aims to analyze the relationship between public economics and national income in promoting social welfare. Public economics plays an important role as a government policy instrument in regulating allocation, distribution, and economic stabilization, while national income serves as a key indicator in measuring a country's economic performance. This research uses a literature review method by analyzing various relevant journals and secondary data sources. The results show that public economics plays a significant role in optimizing the use of national income to improve social welfare. National income has a positive impact on social welfare through increased per capita income, expanded employment opportunities, and improved access to public services. However, an increase in national income does not always lead to equal welfare distribution due to income inequality. Therefore, effective public economic policies are required to ensure fair distribution of development outcomes. In conclusion, there is a strong relationship between public economics and national income in improving social welfare. A synergy between both is essential to ensure that economic growth is inclusive, equitable, and sustainable.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Tita Deska Sari, et al. (2026), Keterkaitan Ekonomi Publik dengan Pendapatan Nasional dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6739>

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi publik dan pendapatan nasional merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam mendorong tercapainya

kesejahteraan masyarakat. Ekonomi publik berperan dalam mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber daya melalui kebijakan pemerintah, sedangkan pendapatan nasional menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kinerja ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun demikian, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama jika distribusi pendapatan tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional bukan satu-satunya indikator kesejahteraan, melainkan perlu didukung oleh kebijakan ekonomi publik yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan kajian literatur, pendapatan nasional memiliki peran strategis dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Peningkatan pendapatan nasional dapat meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi tingkat pengangguran, serta memperkuat daya beli masyarakat. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang masih cukup tinggi, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi publik untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil. Ekonomi publik sendiri merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas peran pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam mengatasi kegagalan pasar dan menciptakan kesejahteraan sosial. Fungsi utama ekonomi publik meliputi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam fungsi alokasi, pemerintah berperan dalam menyediakan barang publik dan mengatur penggunaan sumber daya agar efisien. Dalam fungsi distribusi, pemerintah bertugas untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan fiskal seperti pajak dan subsidi. Sedangkan dalam fungsi stabilisasi, pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan makroekonomi.

Keterkaitan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional menjadi sangat penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja ekonomi, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan data pendapatan nasional untuk menentukan alokasi anggaran, kebijakan pajak, serta program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pendapatan nasional menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi publik. Selain itu, kajian lain menunjukkan bahwa integrasi antara ekonomi publik dan pendapatan nasional dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan. Kebijakan ekonomi publik yang berbasis pada data pendapatan nasional dapat membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kedua aspek tersebut sangat diperlukan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pendapatan nasional juga berperan sebagai pondasi dalam pengelolaan ekonomi publik, terutama dalam mendukung fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pengelolaan pendapatan nasional yang baik dapat mendorong pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pendapatan nasional yang diperoleh dapat dikelola secara efisien dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam mengoptimalkan keterkaitan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, terutama dalam hal penerimaan pajak yang masih relatif rendah. Hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan melaksanakan program kesejahteraan. Selain itu, sektor informal yang cukup besar di Indonesia juga menjadi kendala dalam pengukuran pendapatan nasional secara akurat, sehingga dapat memengaruhi perumusan kebijakan ekonomi publik.

Di sisi lain, meskipun pendapatan nasional dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi ekonomi suatu negara, indikator ini memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan nasional tidak memperhitungkan faktor-faktor non-ekonomi seperti kualitas lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta tingkat kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya bergantung pada pendapatan nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendapatan nasional memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan ekonomi, meskipun tidak

sepenuhnya mampu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara utuh . Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara indikator ekonomi dan kebijakan publik untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi publik dan pendapatan nasional memiliki hubungan yang erat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional menyediakan dasar informasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sementara ekonomi publik memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan fiskal, serta keterbatasan indikator pendapatan nasional dalam mengukur kesejahteraan secara menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam keterkaitan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu ekonomi publik serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kajian teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel utama yang dikaji adalah ekonomi publik, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara. Ekonomi publik berperan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian, sedangkan pendapatan nasional menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi dan kebijakan pembangunan. Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya dalam mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam teori ekonomi publik, pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Barang publik ini tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar sehingga membutuhkan intervensi pemerintah. Fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan kekayaan melalui kebijakan fiskal seperti pajak progresif dan subsidi. Sementara itu, fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal agar terhindar dari inflasi tinggi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi lainnya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, ekonomi publik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Tanpa intervensi pemerintah, mekanisme pasar seringkali menghasilkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, sehingga sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara adil. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam pendapatan nasional dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Secara umum, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan nasional sering diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan yang paling sering digunakan, di mana pendapatan nasional dihitung dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto.

Dalam teori ekonomi klasik dan Keynesian, pendapatan nasional sangat berkaitan dengan tingkat keseimbangan ekonomi. Menurut Keynes, pendapatan nasional ditentukan oleh permintaan agregat. Ketika permintaan agregat meningkat, maka produksi barang dan jasa akan meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya, jika permintaan agregat menurun, maka pendapatan nasional juga akan menurun. Dalam konteks ini, ekonomi publik memiliki peran penting dalam mendorong permintaan agregat melalui kebijakan fiskal, seperti peningkatan belanja pemerintah dan pemberian stimulus ekonomi. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi secara layak. Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan sering dikaitkan dengan tingkat pendapatan, distribusi pendapatan,

dan akses terhadap layanan publik. Meskipun pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan, namun indikator ini tidak sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini karena pendapatan nasional tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, kualitas lingkungan, serta aspek sosial lainnya.

Hubungan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan melalui mekanisme kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan pendapatan nasional sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi publik, seperti pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, semakin baik pengelolaan ekonomi publik, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori pertumbuhan ekonomi juga menjelaskan keterkaitan antara pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori pertumbuhan neoklasik (Solow), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi. Peningkatan pendapatan nasional mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Oleh karena itu, peran ekonomi publik sangat penting dalam memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan (welfare economics), kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila terjadi efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil. Pemerintah memiliki peran untuk memperbaiki kegagalan pasar melalui kebijakan ekonomi publik. Misalnya, melalui subsidi pendidikan dan kesehatan, pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan pajak progresif juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Di Indonesia, hubungan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah menggunakan data pendapatan nasional sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui APBN, pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk berbagai sektor strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan serta keterbatasan dalam efektivitas kebijakan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi publik dan pendapatan nasional memiliki hubungan yang sangat erat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ekonomi publik berperan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi dan stabilitas ekonomi, sedangkan pendapatan nasional menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi dan dasar perumusan kebijakan. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi yang baik antara kebijakan ekonomi publik dan pertumbuhan pendapatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian studi literatur, di mana peneliti memanfaatkan berbagai buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya untuk mendukung pengumpulan data. Proses analisis data melibatkan pengamatan dan penilaian mendalam terhadap sumber-sumber bacaan tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat hasil penelitian. Subjek utama dalam penelitian ini mencakup e-jurnal, e-book, dan buku-buku pendukung lainnya. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengevaluasi studi pustaka, termasuk buku dan jurnal yang berfungsi sebagai referensi penting dalam penelitian ini. Analisis ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam dari sumber-sumber tersebut untuk mendukung temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Kajian Literatur*

**Tabel 1.** Hasil Kajian Literatur

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Temuan Utama	Kaitan dengan Penelitian Ini
----	------------------	------------------	--------------------	------------------------------

1	Aulia & Riofita (2025)	Ekonomi publik dan pendapatan nasional	Ekonomi publik berperan dalam mengoptimalkan penggunaan pendapatan nasional untuk kesejahteraan masyarakat	Menegaskan bahwa kebijakan pemerintah menentukan efektivitas distribusi pendapatan
2	Huda & Riofita (2025)	Pendapatan nasional dan kesejahteraan	Pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita	Mendukung bahwa pendapatan nasional indikator utama kesejahteraan
3	Gunawan & Riofita (2025)	Peran ekonomi publik	Ekonomi publik berperan dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi	Menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi
4	Simanullang & Silalahi (2025)	Pendapatan nasional terhadap kesejahteraan	Peningkatan pendapatan nasional meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak merata jika tanpa kebijakan publik	Menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi
5	Nurjannah (2025)	Kebijakan fiskal dan ekonomi publik	Kebijakan fiskal berbasis pendapatan nasional dapat meningkatkan efektivitas pembangunan	Menegaskan hubungan pendapatan nasional dan kebijakan pemerintah
6	BPS (2025)	Data pendapatan nasional Indonesia	Pendapatan nasional Indonesia meningkat, namun ketimpangan masih terjadi	Memberikan data empiris kondisi Indonesia
7	Mankiw (2018)	Teori ekonomi makro	Pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah	Menjadi dasar teori hubungan ekonomi publik dan pendapatan nasional
8	Musgrave (teori ekonomi publik)	Peran pemerintah dalam ekonomi	Pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi	Menjadi dasar teori ekonomi publik
9	Stiglitz (ekonomi publik modern)	Efisiensi dan keadilan ekonomi	Pasar tidak selalu efisien sehingga perlu intervensi pemerintah	Mendukung pentingnya ekonomi publik
10	Todaro & Smith	Pembangunan ekonomi	Kesejahteraan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan	Menguatkan konsep kesejahteraan multidimensi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekonomi publik berperan penting dalam mengatur distribusi dan stabilitas pendapatan nasional
2. Pendapatan nasional berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
3. Namun, tanpa kebijakan ekonomi publik yang baik, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu merata
4. Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi

#### **Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara ekonomi publik, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi publik dan pendapatan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan ini bersifat saling memengaruhi, di mana ekonomi publik menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan nasional agar dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan optimal bagi masyarakat.

Ekonomi publik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern, terutama dalam mengatasi kegagalan pasar (market failure) dan menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam teori ekonomi publik, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi berhubungan dengan pemerataan pendapatan melalui kebijakan fiskal seperti pajak progresif dan subsidi. Sementara itu, fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi-fungsi ekonomi publik tersebut menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik melalui kebijakan ekonomi publik. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pendapatan nasional tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam hal distribusi dan pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil kajian literatur, pendapatan nasional terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat, serta meningkatnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan secara merata. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang masih terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam pendapatan nasional belum sepenuhnya bersifat inklusif.

Dalam teori ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep trickle-down effect, yaitu asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam praktiknya, efek ini tidak selalu terjadi secara sempurna. Sebagian kelompok masyarakat justru lebih cepat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi publik untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan.

Ekonomi publik berperan sebagai instrumen utama dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Melalui kebijakan fiskal seperti pajak dan subsidi, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Pajak progresif, misalnya, memungkinkan pemerintah untuk menarik lebih banyak kontribusi dari kelompok berpendapatan tinggi dan menyalurkannya kembali dalam bentuk program sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa pendapatan nasional menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan ekonomi publik. Pemerintah menggunakan data pendapatan nasional sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui APBN, pemerintah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai indikator ekonomi, tetapi juga sebagai alat kebijakan dalam ekonomi publik.

Hubungan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional juga dapat dilihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Keynesian, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dalam hal ini, ekonomi publik melalui pengeluaran pemerintah memiliki peran langsung dalam meningkatkan permintaan agregat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan nasional. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, maka kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik juga semakin besar, sehingga menciptakan siklus positif dalam pembangunan ekonomi.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam mengoptimalkan hubungan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Meskipun pendapatan nasional meningkat, tidak semua pendapatan tersebut dapat dioptimalkan menjadi penerimaan negara, terutama di negara berkembang yang masih memiliki sektor informal yang besar. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pembiayaan program-program kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tantangan lainnya adalah efektivitas kebijakan publik itu sendiri. Tidak semua kebijakan ekonomi publik mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang tepatnya sasaran kebijakan, korupsi, serta lemahnya tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi publik agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, hasil kajian menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan nasional semata, tetapi juga oleh faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, pendekatan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat harus bersifat multidimensional. Indeks seperti Human Development Index (HDI) sering digunakan sebagai pelengkap indikator pendapatan nasional dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi publik dan pendapatan nasional memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ekonomi publik berperan sebagai instrumen kebijakan untuk mengelola dan mendistribusikan pendapatan nasional agar lebih merata, sedangkan pendapatan nasional menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi suatu negara. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara optimal apabila kedua aspek ini berjalan secara sinergis dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai keterkaitan ekonomi publik dengan pendapatan nasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa ekonomi publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengoptimalkan penggunaan pendapatan nasional agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata kepada masyarakat. Ekonomi publik melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi berperan sebagai instrumen utama pemerintah dalam menciptakan efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

Pendapatan nasional terbukti memiliki hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana peningkatan pendapatan nasional dapat meningkatkan pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, karena masih terdapat permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, ekonomi publik berperan penting dalam memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan pendapatan nasional dapat didistribusikan secara adil melalui kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi, dan belanja pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara ekonomi publik dan pendapatan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang baik antara keduanya sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ekonomi publik menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pendapatan nasional dapat benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### REFERENSI

- Aulia, S., & Riofita, H. (2025). *Peran Pendapatan Nasional sebagai Pondasi dalam Pengelolaan Ekonomi Publik*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 16520–16522. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28339>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Pendapatan Nasional Indonesia 2020–2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/20/63d723755172c429560055db/pendapatan-nasional-indonesia-2020-2024.html>
- Gunawan, A., & Riofita, H. (2025). *Peran Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Publik: Konsep, Manfaat, dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28769>

- Hendra Riofita, BENTUK PERANAN GURU DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2016
- Hendra Riofita. Predicting Muslim Female Customer Retention Through Islamic Marketplace Attractiveness. Journal of Islamic Economic and Business Research
- Hendra Riofita. The Effect of Think Pair Share and Intelligence Quotient on Economics Students' Learning Outcome. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol.14, 3 (September, 2022), pp. 4247-4254
- Huda, F. N. N., & Riofita, H. (2025). *Peran Pendapatan Nasional dalam Menilai Kesejahteraan Masyarakat dan Stabilitas Ekonomi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 16366–16368. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28293>
- Nabila, A. P., & Riofita, H. (2025). *Ekonomi Publik dan Pendapatan Nasional: Duet Strategi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 16607–16610. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28372>
- Nurjannah, & Riofita, H. (2025). *Keterkaitan Pendapatan Nasional dengan Ekonomi Publik dalam Formulasi Kebijakan Fiskal*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 16044–16046. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28218>
- Simanullang, F. Y., & Silalahi, R. (2025). *Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/9168>